

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Sri Purnamawati
160810244**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAAN
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Sri Purnamawati
160810244**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sri Purnamawati
NPM : 160810244
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 22 Januari 2021



SRI PURNAMAWATI
160810244

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

Sri Purnamawati

160810244

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini . .**

Batam, 22 Januari 2021



**Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.
Pembimbing**

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan wujud dari *good governance* di bidang politik melalui pembangunan nasional dengan tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Pemerintah daerah diharap dapat mengelola keuangan daerah yg terdapat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya dengan meningkatkan potensi pendapatan daerah dan memberi alokasi belanja daerah yang tinggi di sektor produktif yaitu belanja modal. Belanja modal digunakan untuk membangun aset tetap berupa fasilitas pelayanan umum yang memadai untuk mendukung investor berinvestasi sehingga tingkat produktifitas semakin maju dan perekonomian semakin baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Batam. Populasi dalam penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi APBD Kota Batam tahun 1999 sampai dengan tahun 2020. Sampel dalam penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi APBD Kota Batam tahun 2013 sampai dengan 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dengan jenis data sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS V26. Hasil hipotesis uji-t menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai t hitung $-0,060 > t \text{ tabel } -2,06390$ dan nilai sig. $0,953 > 0,05$. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai t hitung $0,05 < t \text{ tabel } 2,06390$ dan nilai sig. $0,960 > 0,05$. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai t hitung $4,196 > t \text{ tabel } 2,06390$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Dan hasil hipotesis uji-f menunjukkan bahwa secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai f hitung $23,551 > f \text{ tabel } 3,01$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Modal

ABSTRACT

Regional autonomy is a form of good governance in the political sector through national development with the aim of creating a prosperous Indonesian society. The regional government is expected to be able to manage regional finances contained in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), one of which is by increasing the potential for regional income and providing a high allocation of regional spending in the productive sector, namely capital expenditure. Capital expenditures are used to build fixed assets in the form of adequate public service facilities to support investors in investing so that productivity levels are more advanced and the economy is getting better. The purpose of this study was to determine the effect of the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and the Regional Original Income on Capital Expenditures in Batam City. The population in this study used the Batam City APBD Realization Report from 1999 to 2020. The sample in this study used the Batam City APBD Realization Report from 2013 to 2019. The data collection technique was carried out by means of documentation with the type of secondary data. Methods of data analysis in this study using SPSS V26. The results of the t-test hypothesis indicate that the General Allocation Fund has no significant effect on Capital Expenditures with a value of t count $-0.060 > t \text{ table } -2.06390$ and a sig. $0.953 > 0.05$. The Special Allocation Fund does not have a significant effect on Capital Expenditures with a value of t count $0.05 < t \text{ table } 2.06390$ and a value of sig. $0.960 > 0.05$. Original Regional Income has a significant effect on Capital Expenditures with a value of t count $4.196 > t \text{ table } 2.06390$ and a value of sig. $0.000 < 0.05$. And the results of the f-test hypothesis show that simultaneously the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and the Regional Original Income have a significant positive effect on capital expenditure with a value of f count $23.551 > f \text{ table } 3.01$ and a sig value. $0.000 < 0.05$.

Keywords: *General Allocation Fund; Special Allocation Fund; Regional Original Income; Capital Expenditures*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam sekaligus Pembimbing Skripsi;
4. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah memberi pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Universitas Putera Batam;
5. Seluruh Pegawai Pemerintah Kota yang membantu dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan di Universitas Putera Batam yang telah memberikan saran atau masukan dalam penyelesaian skripsi ini..

Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 22 Januari 2021



Sri Purnamawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	6
1.6.1. Manfaat Teoritis	6
1.6.2. Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Teori Dasar Penelitian	8
2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	8
2.1.2. Teori Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD)	9
2.1.3. Teori Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.3.1. Belanja Modal	10
2.1.3.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	11
2.1.3.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	12
2.1.3.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
2.2. Penelitian Terdahulu	17
2.3. Kerangka Pemikiran	20
2.4. Hipotesis Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Desain Penelitian	23
3.2. Operasional Variabel	24
3.2.1. Variabel Dependen	24
3.2.2. Variabel Independen	24
3.2.2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)	24
3.2.2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)	24
3.2.2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
3.3. Populasi dan Sampel	25
3.3.1. Populasi	25
3.3.2. Sampel	25

3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5.	Metode Analisis Data.....	26
3.5.1.	Statistik Deskriptif	27
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik.....	27
3.5.3.	Uji Autokorelasi.....	28
3.5.3.	Regresi Linear Berganda.....	29
3.5.4.	Uji Hipotesis	29
3.5.4.1.	Uji Statistik t (Secara Parsial)	29
3.5.4.2.	Uji Statistik F (Secara Simultan)	30
3.5.4.3.	Uji Koefisien Determinasi (R ²)	31
3.6.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	31
3.6.1.	Lokasi.....	31
3.6.2.	Jadwal Penelitian	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1.	Hasil Penelitian	32
4.1.1.	Analisis Statistik Deskriptif	32
4.1.2.	Hasil Uji Asumsi Klasik	33
4.1.3.	Analisis Linear Berganda.....	39
4.2.	Pembahasan.....	43
4.2.1.	Analisis Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	44
4.2.2.	Analisis Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	45
4.2.3.	Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		48
5.1.	Kesimpulan.....	48
5.2.	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		50
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 3. 1 Desain Penelitian	23
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normal Histogram.....	34
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normal P-P Plot	34
Gambar 4. 3 Hasil Uji Scatter Plott	37

DAFAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah di Kota Batam	1
Tabel 1. 2 Rasio Ketergantungan Daerah di Kota Batam	3
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	25
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	32
Tabel 4. 2 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov Test	35
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas	36
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	37
Tabel 4. 5 Hasil Uji Durbin-Watson.....	38
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	39
Tabel 4. 7 Hasil Uji T	41
Tabel 4. 8 Hasil Uji F	42
Tabel 4. 9 Hasil Uji R ²	43

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 2. 1 Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).....	12
Rumus 3. 1 Regresi Linear Berganda.....	29
Rumus 3. 2 Rumus t hitung.....	29
Rumus 3. 3 Rumus f hitung.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia reformasi memberikan dampak perubahan pada pola kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Otonomi daerah merupakan wujud dari *good governance* di bidang politik melalui pembangunan nasional dengan tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kinerja pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu memaksimalkan potensi pendapatan daerah dengan memberikan alokasi belanja daerah yang tinggi di sektor produktif yaitu anggaran belanja modal.

Belanja modal berupa pengeluaran yang digunakan membangun aset tetap berupa fasilitas pelayanan publik yang memadai untuk menarik investor menanamkan modalnya sehingga tingkat produktifitas akan semakin maju dan meningkatkan perekonomian.

Dibawah ini tabel rasio belanja modal terhadap belanja daerah di Kota Batam tahun 2009-2012.

Tabel 1. 1 Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah di Kota Batam

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio
2009	Rp. 215.122.431.435,98	Rp. 1.005.647.756.790,67	21%
2010	Rp. 289,369,294,009.41	Rp. 1,204,940,824,077.04	24%
2011	Rp. 139.952.358.506,47	Rp. 1.189.749.719.254,94	12%
2012	Rp. 242,455,787,877.83	RP. 1.378.395.207.767,42	17%

Sumber : <http://bpkad.batam.go.id> dan <http://arsipskpd.batam.go.id> (data diolah)

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 perbandingan jumlah belanja modal terhadap belanja daerah di Kota Batam sebesar 21%, pada tahun 2010 naik menjadi 24%, pada tahun 2011 menurun tajam yaitu menjadi 12% dan pada tahun 2012 mengalami sedikit kenaikan menjadi 17%. Secara keseluruhan di Kota Batam dari tahun 2009 sampai 2012 memiliki anggaran belanja modal tidak lebih dari 30% yang terbilang masih rendah. Kemampuan keuangan untuk setiap daerah berbeda dalam mendanai kegiatan pemerintahannya. Untuk mengantisipasi kesenjangan fiskal, pemerintah daerah menggunakan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Umum (DAK) digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer adalah masalah yang sering timbul sebab pemerintah daerah kurang mampu mengelola anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa dana transfer dari APBN yang dibagikan untuk membantu menangani pembiayaan kegiatan khusus urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di suatu daerah tertentu.

Dalam sistem otonomi daerah, yang menjadi tulang punggung pembiayaan daerahnya adalah pendapatan asli daerah itu sendiri. Berkembangnya suatu daerah dapat dipengaruhi oleh tingginya pendapatan asli daerah. Untuk dapat mengetahui peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah dapat dijadikan tolak ukur karena pendapatan asli daerah merupakan pendapatan murni suatu daerah.

Rasio ketergantungan menunjukkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dari pusat. Semakin tinggi rasio pendapatan asli daerah maka ketergantungan daerah semakin rendah artinya tinggi derajat kemandirian daerah tersebut. Namun sebaliknya jika semakin tinggi rasio dana transfer semakin tinggi pula ketergantungan daerah yang artinya derajat kemandirian daerah tersebut akan semakin rendah.

Tabel 1. 2 Rasio Ketergantungan Daerah di Kota Batam

Tahun	PAD	Dana Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio PAD	Rasio Dana Transfer
2009	154.375.851.953	748.124.997.010	911.118.285.383	17%	82%
2010	159.012.958.078	844.975.731.92	1.061.784.303.579	15%	79%
2011	324.579.442.753	845.665.836.508	1.279.229.619.280	25%	66%
2012	413.178.934.109	1.028.958.494.715	1.490.029.364.338	27%	69%

Sumber : <http://bpkad.batam.go.id> dan <http://arsipskpd.batam.go.id> (data diolah)

Pada table 1.2. dapat diketahui bahwa rasio pendapatan asli daerah pada tahun 2009 hingga 2012 mengalami naik dan turun. Pada tahun mencapai 17%, tahun 2010 turun menjadi 15%, tahun 2011 naik menjadi 25% dan tahun 2012 naik lagi sebesar 27%. Sedangkan untuk rasio dana transfer pada tahun 2009 hingga 2012 juga mengalami naik dan turun mmencapai 82%, tahun 2010 turun menjadi 79%, tahun 2011 turun lagi menjadi 66% dan tahun 2012 naik menjadi 69%. Dapat disimpulkan rasio pendapatan asli daerah lebih kecil dari pada rasio dana transfer, yang artinya tingkat ketergantungan daerah Kota Batam dapat dinilai tinggi.

Penelitian terdahulu menguji pengaruh pendapatan terhadap belanja modal, beberapa diantaranya juga menguji kecenderungan pemerintah daerah yang menggantungkan diri dari transfer pemerintah pusat dibanding memaksimalkan

pendapatan asli daerah. Hasil penelitian dari (Juniawan & Suryantini, 2018), menemukan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus memberi pengaruh terhadap belanja modal secara simultan maupun parsial.

Dari pemaparan diatas, peneliti mengambil judul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Batam”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi permasalahan yang ditemukan adalah :

1. Penerimaan belanja modal di Kota Batam pada tahun 2009-2012 berfluktuasi dan masih memberikan anggaran belanja modal dengan proporsi yang kecil yaitu tidak lebih dari 30%.
2. Rasio pendapatan asli daerah di Kota Batam lebih kecil dari pada rasio dana transfer, dengan kata lain tingkat kemandirian daerah kurang baik.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian menggunakan data Laporan Triwulan Realisasi APBD untuk 7 tahun periode 2013-2019.
2. Penulis membatasi ruang lingkup masalah sumber belanja modal hanya pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam.

3. Objek dalam penelitian ini yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kota Batam.

4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan terhadap Belanja Modal di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa Prodi Akuntansi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi atau data yang dapat membantu masyarakat agar lebih memahami pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Batam

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam pengelolaan keuangan atau menjadi bahan informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mendorong

pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui belanja modal.

2. Bagi Akademisi Universitas Putera Batam

Sebagai bahan perbendaharaan referensi kepustakaan untuk menambah wawasan bagi para akademisi khususnya jurusan akuntansi.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Sebagai bahan acuan untuk pengembangan topik yang sama pada penelitian berikutnya.

4. Bagi Peneliti

Sebagai penerapan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut (Banjarnahor & Lubis, 2020) Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat dengan memberikan kemerdekaan dan fleksibilitas untuk pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola masyarakat dalam wilayah administratifnya sesuai dengan peraturan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan otonomi daerah atau pemerintahan, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk operasi kegiatannya sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut (Abdul Halim, 2009) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan catatan rencana kinerja pemerintah daerah dengan biaya sebagai batas maksimal dan sumber penerimaan sebagai target minimal untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memuat kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan dari sumber kekayaan daerah tersebut. Di Laporan APBD terdapat Pendapatan yang dibagi menjadi 3 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer/Dana

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Sedangkan Belanja dibagi 3 yakni Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Rancangan kerja Pemerintah untuk satu periode dalam pengelolaan keuangan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan atas asas umum pengelolaan keuangan daerah. seperti yang ada dalam PP RI Nomor 105 Tahun 2000 pasal 4 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketaatan Pemda terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat ditinjau melalui Laporan Realisasi Anggaran.

2.1.2. Teori Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD)

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) adalah laporan berisi informasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berfungsi menilai kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran. LRA APBD menyajikan laporan secara komparatif mengenai perhitungan sumber daya ekonomi yang akan didapat sebagai pembiayaan dalam kinerja pemerintah untuk periode yang akan datang.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi tentang realisasi dari pendapatan, belanja, transfer, *surplus/defisit*, pembiayaan, dan Silpa yang dibandingkan dengan anggarannya pada satu periode.

Dengan adanya LRA, kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas pengelolaan APBD dapat dievaluasi. LRA juga berguna memprediksi sumber daya ekonomi yang akan didapat untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode yang akan datang dengan cara penyajian laporan komparatif..

2.1.3. Teori Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1. Belanja Modal

Menurut Draise (2008 : 39) Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah pada satu periode yang tidak mendapat pengembalian, meliputi seluruh pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi modal dana lancar. Belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat 4 bagian utama yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang/jasa dan belanja lainnya.

Menurut Halim (2008: 101), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya dengan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut Darise (2008 : 141), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam mendapatkan aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari 1 periode. Sedangkan menurut (Darise, 2008), Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan/pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun. Beberapa jenis belanja modal antara lain:

1. Belanja tanah, yaitu belanja untuk pengadaan, pembelian atau pembebasan penyelesaian, sewa dan balik nama tanah, pematangan tanah, pengosongan, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan hak atas tanah hingga tanah siap digunakan.
2. Belanja mesin dan peralatan yaitu belanja dalam rangka pengadaan, penambahan atau penggantian kapasitas mesin dan peralatan serta inventaris kantor yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dan sampai barang siap digunakan.

3. Belanja gedung dan bangunan yaitu belanja untuk pengadaan, penambahan atau penggantian, dan pengeluaran mulai dari perencanaan, tahap pengawasan dan tahap pengelolaan pembangunan gedung/bangunan yang menambah kapasitas hingga dalam keadaan siap digunakan.
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan, yaitu pengeluaran yang digunakan dari tahap perencanaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas hingga dalam keadaan siap digunakan.

Belanja aset tetap lainnya, yaitu belanja dalam pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan pembangunan hingga perawatan fisik lainnya, yang tidak termasuk kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Yang termasuk belanja ini yaitu belanja kontrak sewa beli, pembelian barang kesenian, barang purbakala atau barang mengisi museum, hewan ternak, tanaman, buku, serta jurnal ilmiah.

2.1.3.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut (RI, 2004) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) lebih diutamakan bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan daerah untuk

membayai keseluruhan pengeluaran dalam menjalankan fungsi dan kewenangan daerah menyediakan pelayanan publik melalui belanja modal. Sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) akan berpengaruh terhadap belanja modal.

Perhitungan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (RI, 2004). PDN Netto adalah pendapatan dalam negeri dikurangi dengan bagi hasil yang diberikan pusat. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal}$$

Rumus 2. 1 Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Keterangan :

1. AD = Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun kedepan
2. CF = Kebutuhan Fiskal (KbF) - Kapasitas Fiskal (KpF)
3. KbF = Total Belanja Daerah (TBD) x ((% Jumlah Penduduk) + (% Luas Wilayah) + (% Invers Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) + (% Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)) + (% Pendapatan Domestik Regional Bruto)
4. KpF = (% Pendapatan Asli Daerah) + (% Dana Bagi Hasil)

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditetapkan oleh keputusan Presiden. Setiap daerah menerima Dana Alokasi Umum dengan jumlah yang berbeda.

2.1.3.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2005, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari APBD yang bagikan untuk daerah tertentu yang

memiliki kebutuhan khusus untuk membantu mendanai kegiatan khusus prioritas nasional di daerah.

Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD minimal 10% sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program kebutuhan khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional”.

Ada 2 tahap untuk menentukan besarnya Dana Alokasi Khusus (DAK) antara lain :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK)

Ada tiga kriteria daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu :

- a. Kriteria umum yaitu dilihat dari kemampuan keuangan daerah dalam APBD dikurangi belanja PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah)
- b. Kriteria khusus ditentukan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara terkait.
- c. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah.

Besarnya jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan melalui perhitungan indeks dari 3 kriteria di atas setiap tahun sesuai dengan program prioritas nasional untuk daerah yang ditentukan.

2.1.3.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Effendi, Marlina, & Purba, 2019), diperlukan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena PAD berfungsi sebagai sumber penerimaan dalam pembiayaan pembangunan dan kunci kemandirian daerah dinilai dari sisi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menambah alokasi belanja modal suatu daerah, dan kualitas pelayanan publik akan semakin baik. Dengan demikian, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) artinya suatu daerah dapat dengan baik melaksanakan desentralisasi fiskal dengan ketergantungan terhadap pemerintah pusat pun sangat kecil.

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Menurut (Yuliadi, 2017) Penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) adalah retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari negara lain,

sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat, dan penerimaan pemerintah daerah. Dari semua penerimaan negara tersebut, pajak penghasilan tetap menjadi sumber utama pendapatan pemerintah di beberapa negara termasuk di Indonesia.

Menurut UU No. 28 tahun 2000, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Pajak daerah dibagi meliputi :

- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Berikut yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi:
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. Jasa giro.

- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan studi pustaka berupa buku-buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan dibawah ini adalah kumpulan jurnal dari hasil penelitian terdahulu yang diambil peneliti karena berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal.

(Huda & Ati Sumiati, 2018) menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian membuktikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memberi pengaruh pada Belanja Modal dengan masing-masing t hitung 2,481 dan 2,161 > t tabel 2,048. Namun Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan t hitung 1,481 < t tabel 2,048. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan f hitung 3,902 > f tabel 2,930.

(Intan Savirra Aidah Rachim, D.P, & Rizal, 2019) menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian membuktikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memberi pengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai sig.

$0,000 < 0,05$, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai sig. $0,086 > 0,05$.

(Juniawan & Suryantini, 2018) menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal terhadap belanja modal. Hasil penelitian membuktikan bahwa ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memberi pengaruh pada belanja modal dengan masing-masing nilai sig. $(0,030)$, $(0,000)$, dan $(0,029) < 0,05$.

(i komang Sudika & Budiarta, 2017) menguji Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian membuktikan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai t hitung $2,373 > t$ tabel $2,019$ dan nilai sig. $0,023 < \alpha (0,05)$. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai t hitung $2,087 > t$ tabel $2,019$ dan nilai sig. $0,043 < \alpha (0,05)$.

(Aditiya & Dirgantara, 2015) menguji Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hasil membuktikan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai t hitung $7,214 > t$ tabel $1,66039$, Sig $0,000 < 0,05$. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dengan nilai sig $0,051 > 0,05$. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai t hitung sebesar $5,499 > t$ tabel $1,66039$, sig $0,000 < 0,05$.

(Mayasari, Sinarwati, & Yuniarta, 2014) menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian

membuktikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi belanja modal dengan t hitung masing-masing 1.18 dan $0,86 > t$ tabel (0.765).

(Putri & Rahayu, 2019) menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal. Hasil dari penelitiannya menemukan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai probabilitas sebesar $0,0499 < 0,05$.

Penelitian (Adur, Apriyanto, & Sutriswanto, 2019) berjudul “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Khusus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal..

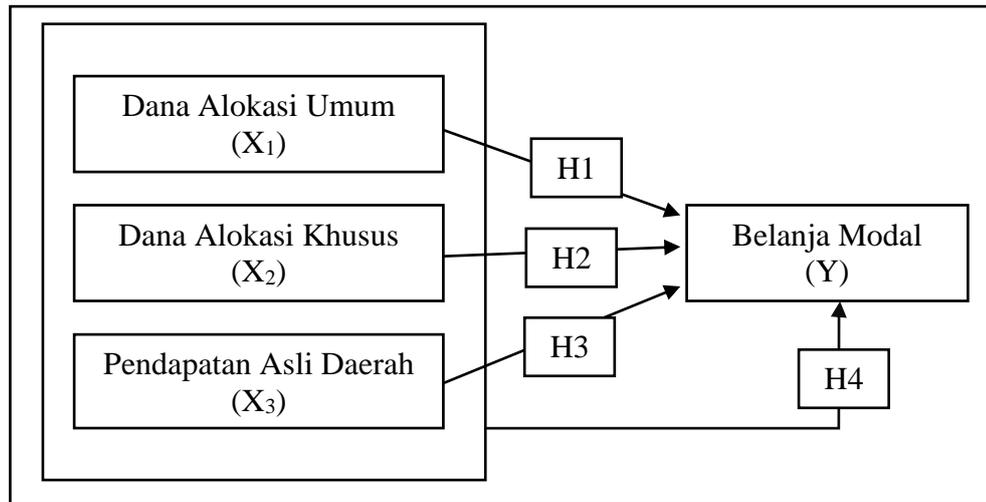
Penelitian (Muda & Ridha, 2018) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dalam Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderator”. Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal karena diketahui koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,0565 dan nilai sig. $0,0853 > 0,05$. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dengan koefisien regresi sebesar 0,125 dan nilai sig. $0,0013 < 0,05$. Hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sebesar 23,61%, sedangkan sisanya 76,39% dipengaruhi oleh penyebab lainnya dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$.

(Sri Ayem & Dessy Dyah Pratama, 2018) menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal. Hasil penelitian menemukan Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal dengan harga t hitung $0,146 > t$ tabel $1,6973$ dan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ yaitu $0,885$. Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dengan harga t hitung $1,671 > t$ tabel $1,6973$ dan nilainya lebih besar dari $0,05$ yaitu $0,508$. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal t hitung $0,749 < t$ tabel $1,6973$ dan nilai signifikan kurang dari $0,05$ yaitu $0,461$.

(Nurzen, 2016) menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal. Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan t hitung $4,487$, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan t hitung $2,547$ dan keduanya mempunyai nilai sig. $0,000 < 0,05$.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan keterkaitan secara parsial maupun simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini tertera pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X_1 : Dana Alokasi Umum (DAU)

X_2 : Dana Alokasi Khusus (DAK)

X_3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Y : Belanja Modal

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran diatas dapat diambil hipotesis penelitiannya yaitu :

H₁ : Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) memberi pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H₂ : Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) memberi pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H₃ : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H4 : Diduga secara bersamaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

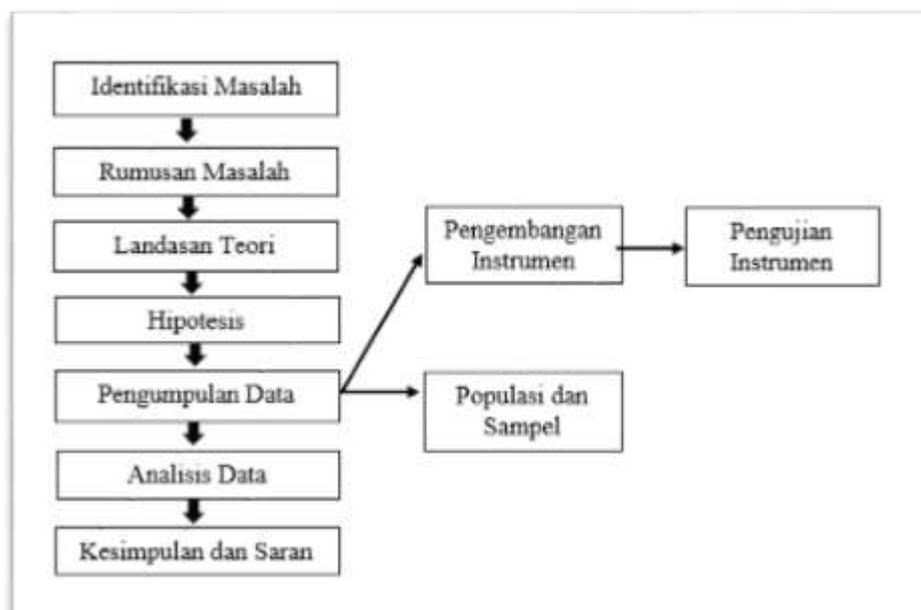
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan model yang digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian atau alur terhadap jalannya penelitian untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian yang diharapkan. Desain pada penelitian ini berawal dari masalah yang bersifat kuantitatif dan membatasi permasalahan yang ada pada rumusan masalah yang dinyatakan dalam kalimat pertanyaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dibuat. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa dokumentasi, dan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam tahun 2013-2019. Data yang terkumpul di analisis menggunakan program *SPSS Versi 26*.



Gambar 3. 1 Desain Penelitian

3.2. Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran berupa pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun masa kegiatan pemerintahan.

3.2.2. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini ada tiga yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel Belanja Modal.

3.2.2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

3.2.2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3.2.2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan murni suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian daerah semakin baik..

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Dana Alokasi Umum (X_1)	DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal.	Rasio
Dana Alokasi Khusus (X_2).	DAK = Bobot Daerah : Bobot Teknis	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X_3)	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah	Rasio

Sumber : Olahan penulis, 2020

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Laporan Realisasi APBD di Kota Batam sejak berdirinya pemerintahan Kota Batam di tahun 1990 hingga tahun 2020.

3.3.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *proposive sampling*. Dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD di Kota Batam dari tahun 2013 hingga 2019 secara triwulan dengan jumlah 28 sampel.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif berupa angka-angka untuk di analisis. Dan sumber pengumpulan

data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan adalah DAU, DAK, PAD dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD secara triwulan tahun 2013 hingga 2019 yang bersumber dari publikasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam .

3.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

1. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dengan menggunakan data sekunder. Peneliti menggunakan *time series* dalam mengambil data penelitian yang dimulai dari tahun 2012 hingga 2019. Data sekunder yang digunakan adalah data Laporan Realisasi APBD di Kota Batam dari tahun 2013 hingga tahun 2019 yang dipublikasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Kota Batam.
2. Metode Studi pustaka, dilakukan oleh peneliti dengan mengkaji beberapa sumber tertulis seperti buku dan jurnal ilmiah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dalam penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

Menurut (Sugyono, 2018) Metode analisis data merupakan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan kuantitatif dengan alat bantu program *SPSS Versi 26* yang dinyatakan dalam bentuk statistik.

3.5.1. Statistik Deskriptif

Menurut (Sugyono, 2018) statistik deskriptif dipakai untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa maksud membuat kesimpulan umum. Menurut (Chandrarini Grahita, 2017) tujuan uji statistik deskriptif adalah menguji dan menjelaskan karakter sampel yang diobservasi. Hasil uji statistik deskriptif biasanya berupa tabel yang berisi nama variabel, nilai rata-rata, deviasi standar, maksimum, minimum, kemudian menjelaskan isi dari tabel.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Ada empat uji asumsi klasik yang dilakukan peneliti yaitu :

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk melihat distribusi data dalam variabel yang diteliti. Jika asumsi ini tidak dilakukan maka uji statistik menjadi tidak sah. Normalitas dapat dilihat dengan uji *Histogram*, *P-Plot* dan *Kolmogorov-Smirnov*.

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ada korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan syarat :

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *VIF* < 10 , artinya tidak ada multikolinieritas
- b. Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan *VIF* > 10 , artinya ada multikolinieritas.

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji ketidaksamaan *variance* dari *residual* untuk semua pengamatan. Jika *variance* dari nilai *residual* tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengidentifikasinya dengan metode *Scatter Plott* dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dan SRESID (nilai residual). Model yang baik bila pada grafik tidak membentuk pola. Untuk statistik dapat memakai *Uji Glejser* yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, begitu sebaliknya.

3.5.3. Uji Autokorelasi

Menurut (imam Ghozali, 2011) Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode t dengan periode $t-1$. Untuk uji ini menggunakan Uji *Durbin-Watson (DW test)*.

Syarat pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut :

- a. Bila nilai DW berada diantara d_U dan $(4-d_U)$ maka tidak terjadi autokorelasi.
- b. Bilai nilai $DW < d$ maka berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai $DW > (4-d_L)$ maka berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila nilai DW berada antara d_U dan d_L atau DW berada anatara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.5.3. Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini menggunakan pengujian pengaruh analisis regresi linier berganda. Dengan tujuan mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$$

Rumus 3. 1 Regresi Linear Berganda

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta (nilai Y jika X = 0)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = Dana Alokasi Umum

X_2 = Dana Alokasi Khusus

X_3 = Pendapatan Asli Daerah

e = error

3.5.4. Uji Hipotesis

3.5.4.1. Uji Statistik t (Secara Parsial)

Uji statistik t menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen secara individual dalam terhadap variabel dependen. Berikut rumus t hitung :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Rumus 3. 2 Rumus t hitung

Keterangan :

t = Nilai uji t

r = Koefisien Korelasi

r^2 = Koefisien Determinasi

n = Jumlah Sampel

Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4.2. Uji Statistik F (Secara Simultan)

Uji Statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Rumus f hitung adalah sebagai berikut :

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)-(n-k-1)}$$

Rumus 3. 3 Rumus f hitung

Keterangan :

F = Nilai uji F

R^2 = Koefisien Korelasi Ganda

k = Jumlah Variabel Independen

n = Jumlah Anggota Sampel

1. Bila F hitung $<$ F tabel, variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Bila F hitung $>$ F tabel, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.5.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut (I. Ghozali, 2016) uji koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan besarnya variasi variabel independen yang dijelaskan oleh variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang baik jika nilai berada di atas 0,5 begitupun sebaliknya.

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1. Lokasi

Lokasi pada penelitian ini adalah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang beralamat di JL. Engku Putri No.1 Batam Center, Batam, Kepulauan Riau.

3.6.2. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2020																2021						
		Ags	Sept				Okt				Nov				Des				Jan				Feb	
			1	3	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Identifikasi Permasalahan	■																						
2	Pengajuan Judul dan Kajian Pustaka		■	■	■	■	■																	
3	Perizinan dan Proposal						■	■	■	■	■													
4	Pengumpulan Data										■	■	■	■	■									
5	Analisis Data															■	■							
6	Hasil dan Pembahasan																■	■						
7	Kesimpulan dan Saran																	■	■					
	Tahap Penyusunan Laporan																					■	■	■

Sumber : Data Penelitian, 2020